

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Kemiskinan

a. Teori Kemiskinan

Teori utama yang digunakan tentang kemiskinan menurut Cheyne, O'Brien dan Belgrave yang terdapat dalam bukunya Akhmad dan Amir adalah:¹

1) Teori Neo-liberal

Penganut teori neo-liberal memiliki pandangan kemiskinan menjadi masalah perorangan yang muncul sebagai akibat dari kelemahan atau keputusan seseorang yang bersangkutan. Mereka berpendapat bahwa pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memperluas kekuatan pasar secara maksimal dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya.² Pandangan Neo-liberal, strategi untuk mengurangi kemiskinan harus memiliki sifat 'residual', dilaksanakan secara sementara, dan terfokus pada partisipasi keluarga, komunitas swadaya, atau lembaga keagamaan.³ Negara berperan dalam paradigma ini dianggap sebagai pengawas yang hanya bisa melakukan intervensi jika lembaga tersebut tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Teori Neo-Liberal percaya bahwa dengan kekuatan mekanisme pasar dan pertumbuhan ekonomi alami, sehingga kemiskinan dan ketidakadilan sosial dapat diatasi secara efektif.⁴

¹ Akhmad dan Amir, *Menanggulangi kemiskinan di daerah* (Yogyakarta: Azkiya Publishing, 2020), 36.

² Pande Nyoman Natasha Deswari, A. A Ketut Jayawarsa, dan I Gusti Ayu Athina Wulandari, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Jumlah Penduduk yang Menganggur Terhadap Kemiskinan di Indonesia 2016-2020," *Warmadewa Economic Development Journal* 6, no. 2 (2023): 63–71.

³ Rudy Susanto dan Indah Pangesti, "Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta," *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 5, no. 4 (29 Agustus 2019): 340, <https://doi.org/10.30998/jabe.v5i4.4183>.

⁴ Akhmad dan Amir, *Menanggulangi kemiskinan di daerah* (Yogyakarta: Azkiya Publishing, 2020), 36.

Mekanisme Pasar adalah suatu sistem dalam penentuan tingkat harga yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kekuatan penawaran dan permintaan, pengaplikasian kebijakan Pemerintah, pajak, keamanan, dan pekerja. Di dalamnya, prinsip moral, persaingan yang sehat, keadilan, keterbukaan dan kejujuran harus dijunjung tinggi.⁵ Mekanisme pasar berdasarkan pandangan Ibnu Khaldun pada karyanya “*Muqaddimah*” dan Adam Smith dengan karyanya “*Wealth of Nations*” dalam penelitian Moh Arifkan “Pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar”, menyatakan banyak faktor yang memengaruhi mekanisme pasar. Teori harga, teori nilai, spesialisasi kerja, dan peran Negara adalah faktor yang memengaruhi mekanisme pasar.⁶

1. Teori harga yang disebut sebagai harga alamiah merujuk pada harga pasar dalam konteks keseimbangan, sebagai hasil dari kemampuan alami di dalam masyarakat. Harga alamiah ini terjadi ketika segala sesuatu berjalan secara alami sehingga terdapat kebebasan bertindak dalam masyarakat. Artinya, setiap orang bebas untuk menghasilkan sesuai keinginannya dan melakukan pertukaran barang sesuai keinginan mereka.
2. Teori nilai didasarkan pada nilai suatu pekerjaan karena tenaga kerja tidak hanya menjadi penyebab tetapi juga alat pengukur nilai. Smith mengatakan bahwa setiap barang memiliki dua nilai, yaitu nilai guna (*value in use*) dan nilai tukar (*value in exchange*). Adam Smith menjadi tokoh utama dalam ekonomi modern dan kapitalisme yang memberikan perhatian khusus pada peran tenaga kerja suatu negara.

⁵ Afiqoh Agustin, Dudang Gojali, dan Reza Fauzi Nazar, “Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun,” *Branding: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 1, no. 2 (4 Desember 2022), <https://doi.org/10.15575/jb.v1i2.21561>.

⁶ Moh Arifkan, “Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar,” *Journal of Islamic Finance* 1, no. 1 (Juli 2020): 1–23.

3. Spesialisasi kerja atau pembagian kerja adalah suatu kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Perbedaan kodrati dalam bakat dan keterbatasan manusia bukanlah hambatan bagi distribusi pekerjaan. Sebaliknya, distribusi pekerjaan dianggap sebagai suatu keharusan bagi manusia yang secara alamiah untuk mencukupi kebutuhannya melalui aktivitas perdagangan dan pertukaran barang.
4. Negara memiliki peran untuk menegakkan keadilan, pemelihara ketentraman, dan penyelenggara kesejahteraan. Adam Smith mengatakan pemerintah dan negara adalah sama. Pendapat tersebut karena dalam prakteknya, negara memiliki peran yang pada umumnya dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Dapat diamati bahwa campur tangan Negara sebenarnya sangat diperlukan untuk memastikan keadilan bagi semua. Meskipun ada pandangan yang menolak campur tangan Negara dalam kebebasan kodrati dan keadilan, namun di sisi lain, dalam konteks sosial yang sama, peran Negara dianggap sangat sentral.⁷

Pertumbuhan ekonomi adalah strategi yang dapat diterapkan negara guna meningkatkan kesejahteraan penduduknya dengan melalui pembangunan, terutama dalam sektor ekonomi, dengan indikator utama adalah pertumbuhan ekonomi.⁸ Sumber daya manusia menurut Adam Smith memiliki peran krusial sebagai input pembangunan ekonomi. Pembangunan tersebut dianggap sebagai pemicu kesejahteraan nasional, dengan penekanan pada pentingnya dua skala yaitu

⁷ Muhalli, "Mekanisme Pasar dalam Pemikiran Adam Smith," *Journal of Islamic Finance* 1, no. 1 (2020): 37–61.

⁸ Ni Putu Ambar Pratiwi dan I Gusti Bagus Indrajaya, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali," *Buletin Studi Ekonomi* 24, no. 2 (2019): 220, <https://doi.org/10.24843/BSE.2019.v24.i02.p05>.

ekonomi dan manusia yang berkualitas. Parameter menilai kualitas manusia dan skala ekonomi adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator yang relevan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pembangunan.⁹ Selain IPM pengaruh pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui pendapatan per kapita, yang mencerminkan pendapatan rata-rata yang didapat setiap orang sebagai hasil dari aktivitas ekonomi di suatu wilayah.¹⁰ Jika ekonomi penduduk berjalan dengan baik, sehingga ikut berkontribusi positif terhadap tumbuhnya ekonomi negara secara keseluruhan.

Keadilan sosial (*social justice*) merupakan tema fundamental dalam kehidupan. Oleh karena itu keadilan sosial meresap diberbagai sektor. Agar keadilan sosial dapat terpenuhi terdapat peran sosial ekonomi syariah ZIS. Pengelolaan manajemen secara optimal.¹¹ potensi besar yang diperoleh dari ZIS dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi dan sosial bangsa sehingga ketidakadilan sosial dapat teratasi. Sebagai pondasi ekonomi Islam. ZIS menjadi salah satu pilar utama dalam struktur ekonomi umat Islam dan tempat yang istimewa dalam konteks ajaran Islam. Lebih dari sekadar bentuk ibadah seperti sholat dan puasa, ZIS dianggap sebagai wujud ibadah yang erat kaitannya dengan dimensi ekonomi, keuangan, dan sosial masyarakat.¹²

⁹ Jahtu Widya Ningrum, Aziza Hanifa Khairunnisa, dan Nurul Huda, “Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (29 Juni 2020): 212, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034>.

¹⁰ Sandra Dwita Sari dan Eni Setyowati, “Analisis Pengangguran, Pendapatan Perkapita, Dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2017- 2020.,” *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 2022, 8–18.

¹¹ Ramadhan Razali dan Sutan Febriansyah, “Eksistensi Keadilan Sosial Dalam Keuangan Publik Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe)* 3, no. 2 (8 November 2019): 40–56, <https://doi.org/10.52490/jeskape.v3i2.431>.

¹² Nurulita Ipmawati dan Tika Widiastuti, “Efektivitas Pengelolaan Dana ZIS Pada Bidang Pendidikan Di Lazismu Kota Surabaya,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 2 (13 Juni 2020): 281–93, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp281-293>.

Penelitian ini memakai teori neo-liberal yang menghasilkan variabel penelitian. Variabel IPM dan Pendapatan diambil berdasarkan teori neo-liberal yang menjelaskan bahwa tumbuhnya ekonomi dapat mengurangi kemiskinan secara efektif yang ditunjukkan dalam teori neo-liberal bahwa memacu pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya dapat mengurangi kemiskinan. Serta variabel tenaga kerja yang diambil dari teori neo-liberal yang menjelaskan bahwa mekanisme pasar dapat mengurangi kemiskinan.¹³ Sedangkan ZIS diambil berdasarkan teori neo-liberal keadilan sosial yang dapat mengurangi kemiskinan.¹⁴

b. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan berasal dari kata miskin yang berarti kondisi seseorang yang pendapatannya tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari sehingga menyebabkan kualitas hidup seseorang menurun karena adanya keterbatasan dalam mengakses kebutuhan dasar.¹⁵

Menurut Amsal (2018), kemiskinan merupakan masalah yang terus terjadi. Kemiskinan diartikan sebagai keadaan seseorang yang kekurangan materi sehingga taraf hidup lebih rendah daripada masyarakat sekitar. Rendahnya standar hidup dapat memperburuk kesehatan, pendidikan, dan kehidupan penduduk miskin.¹⁶

Menurut World Bank (2004) kemiskinan dapat digambarkan sebagai keadaan kelaparan, ketiadaan tempat tinggal, sakit yang tidak mampu untuk periksa ke dokter, kurang akses ke sekolah dan ketidakmampuan membaca, serta tidak memiliki pekerjaan dan kekhawatiran terhadap masa depan kehidupan.¹⁷

Menurut Friedman (1979) kemiskinan adalah hasil dari ketidaksetaraan dalam mengumpulkan dasar kekuasaan

¹³ Sari, "Analisis Tingkat Kemiskinan Masyarakat Di Provinsi Sumatera Utara."

¹⁴ El Islami dan Fitrianto, "Pengaruh Penyaluran Dana ZIS, Inflasi, Dan Gini Ratio Terhadap Tingkat Kedalaman Kemiskinan Satu Dekade."

¹⁵ Devi Arfiani, *Berantas Kemiskinan* (Semarang: Alprin, 2019), 5-6.

¹⁶ Amsal, *Eksistensi Kemiskinan Perkotaan Dan Kebijakan Penanganannya* (Jakarta: Indocamp, 2018), 9.

¹⁷ Khabib Alia Akhmad, "Peran Pendidikan Kewirausahaan Untuk Mengatasi Kemiskinan," *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 02, no. 06 (2021): 173-81.

sosial. Dasar kekuasaan sosial ini mencakup berbagai elemen yaitu modal produktif atas aset, sumber keuangan, organisasi sosial dan politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial dan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kehidupan.¹⁸

Menurut Chambers (1998) kemiskinan dapat diartikan sebagai konsep yang terintegrasi, mencakup lima dimensi utama, yaitu: 1. Kemiskinan, 2. Ketidakberdayaan, 3. Kerentanan terhadap situasi darurat, 4. Ketergantungan, dan 5. Keterasingan, baik dalam konteks geografis maupun sosiologis.¹⁹

c. Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Kuncoro kemiskinan dapat disebabkan beberapa faktor dari pandangan sisi ekonomi:

1. Adanya kemiskinan disebabkan ketimpangan distribusi pendapatan yang tidak merata pola kepemilikan sumberdaya. Sumber daya yang dimiliki penduduk miskin kualitasnya rendah dan terbatas.
2. Adanya perbedaan tingkat sumber daya manusia. Rendahnya SDM dapat menyebabkan daya hasil yang rendah menjadikan pendapatan yang diterima rendah.
3. Adanya kemiskinan karena terdapat perbedaan akses modal. Modal yang terbatas menyebabkan seseorang sulit untuk mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan. Dengan pendidikan akan menjadikan SDM yang tinggi maka produktivitas akan meningkat dan pendapatannya juga bertambah.²⁰

d. Jenis Kemiskinan

Kemiskinan memiliki empat bentuk berdasarkan kondisi yang dianggap sebagai masalah multidimensional. Empat bentuk kemiskinan tersebut adalah:

¹⁸ Lisda Aisyah, Mona Khairida Syafa, dan Rabban Ghina, “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2012-2022,” *Jurnal Ekonomi Syariah STAI Darul Ulum Kandungan* 1, no. 1 (2023): 27–39.

¹⁹ Theogive Maral Sapaat, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun (2005-2019),” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20, no. 03 (2020): 45–56.

²⁰ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2010), 140-152.

1. Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut merupakan keadaan seseorang dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan sehingga untuk mencukupi kebutuhan dasar masih kurang. Kebutuhan dasar seseorang yang wajib dipenuhi adalah kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan standar hidup. Bentuk kemiskinan absolut banyak digunakan untuk konsep yang menentukan kriteria penduduk miskin.

2. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif merupakan bentuk kemiskinan yang disebabkan dampak dari kebijakan pembangunan yang belum merata semua kalangan masyarakat sehingga terjadi ketimpangan pendapatan atau ketimpangan kesejahteraan. Daerah yang mengalami ketimpangan belum dapat terjangkau kebijakan pembangunan akan menjadi daerah yang tertinggal.

3. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang terbentuk karena akibat dari masyarakat yang tidak mau memperbaiki taraf kehidupan yang lebih moderen. Sikap masyarakat tersebut berasal dari budaya atau adat istiadat yang ada di daerah tersebut.

4. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang muncul akibat terbatasnya akses terhadap sumber daya, yang disebabkan oleh kelemahan dalam kerangka sosial-budaya atau politik-sosial yang tidak mendukung secara memadai upaya pengentasan kemiskinan. Kemiskinan ini merupakan kemiskinan yang dapat menyebabkan tiga bentuk kemiskinan yaitu absolut, relatif dan kultural.²¹

Terdapat dua jenis kemiskinan jika dilihat dari sifatnya yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan.

1. Kemiskinan alamiah merupakan kemiskinan yang disebabkan terbatasnya sumber daya alam dan sarana umum seperti jalan raya, listrik dan air bersih yang masih minim, serta bentuk tanah yang kurang subur. Daerah yang mengalami kondisi ini pada umumnya

²¹ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (1) Edisi kedelapan* (Jakarta: Erlangga, 2003), 247.

adalah yang tertinggal yang belum dijangkau kebijakan pemerintah dalam membangun daerah itu.

2. Kemiskinan buatan merupakan kemiskinan yang terjadi karena sistem pembangunan yang menyebabkan tidak ada kesempatan masyarakat yang merata untuk menikmati fasilitas, sumber daya dan sarana pada daerah tersebut. Kemiskinan seperti ini memiliki dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan yang pada umumnya dipakai untuk negara berkembang. Untuk mengejar target yang tinggi menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Tidak meratanya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan tidak meratanya hasil pembangunan sektor industri yang lebih menikmati keuntungan dibandingkan dengan sektor pertanian.²²

e. Indikator Kemiskinan

Terdapat tiga indikator kemiskinan yang dianggap sebagai kontruksi yang membentuk kemiskinan di Indonesia, yaitu :

1. Aspek ekonomi dapat dibagi menjadi delapan indikator, yaitu : terpenuhinya kebutuhan pangan yang bermutu, memiliki rumah yang memadai, pemenuhan kebutuhan sandang minimal satu set per tahun, pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar, pemenuhan akses layanan kesehatan, terpenuhinya akses lapangan pekerjaan, ketersediaan akses air bersih yang cukup, dan kepemilikan aset.
2. Aspek Sosial dibagi menjadi tujuh indikator, yaitu : kemudahan mengakses informasi, kemudahan mengakses transportasi, kemudahan mengakses pelayanan sosial, kemudahan mengakses pelayanan pemerintah, terbukanya kesempatan berusaha serta pemilihan sumber yang strategis, kemampuan menjalankan peran sosial di keluarga, dan kemampuan menjalankan peran sosial di masyarakat dan pemerintah.

²² Elvira Handayani Jacobus, Paulus . Kindangen, dan Een N. Walewangko, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara," *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 19, no. 7 (2018): 86–103, <https://doi.org/10.35794/jpekd.19900.19.7.2018>.

3. Aspek Budaya dibagi menjadi tujuh indikator, yaitu : memiliki tingkat disiplin yang tinggi dimasyarakat, menjaga kebersihan dan kesehatan, memiliki etos kerja yang tinggi, mengatur pengeluaran dengan baik, berorientasi ke masa depan (selalu ingin maju), gigih memperjuangkan nasib atau tidak mudah menyerah pada nasib, dan memiliki sikap mandiri atau tidak bergantung kepada orang lain.²³

f. Kemiskinan menurut Pandangan Islam

Dalam perspektif Islam, kemiskinan dianggap sebagai permasalahan yang dapat menimbulkan risiko terhadap kesejahteraan dan keimanan seseorang, sebab erat kaitannya dengan potensi kekufuran. Hidup dalam kondisi kekurangan materi dapat menghambat seseorang dalam melaksanakan kewajiban agama secara optimal, menghambat akses terhadap pendidikan berkualitas, dan menyulitkan dalam mencapai taraf hidup dan kesehatan yang layak.²⁴ Ajaran agama Islam menegaskan larangan untuk umatnya agar tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik dari segi keimanan, pengetahuan, maupun aspek ekonomi (kesejahteraan), sebagaimana diwujudkan dalam firman Allah:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”* (QS An-Nisa Ayat 9).²⁵

²³ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015),129-130.

²⁴ Nurul Aeni, “Respon Agama terhadap Kemiskinan: Perspektif Sosiologi,” *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 2, no. 1 (30 Maret 2021): 47–59, <https://doi.org/10.22373/jsai.v2i1.1260>.

²⁵ Al-Qur’an, *An-Nisa ayat 9, Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur’an, 2001), 78.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan Permasalahan yang memerlukan penyelesaian, karena kemiskinan sering kali menjadi penyebab manusia menolak nikmat Tuhan dan berpotensi menyimpang dari ajaran agama. Keberadaan kemiskinan juga menjadi akar masalah dalam kehidupan, baik dalam dimensi ekonomi maupun spiritual-religius, yang dapat mendorong individu untuk mengambil langkah-langkah yang bertentangan dengan prinsip agama atau hukum negara. Dalam perspektif sosiologi agama, agama Islam tidak hanya berfungsi sebagai sumber kedamaian dan keamanan bagi penganutnya, tetapi juga hadir sebagai kritik terhadap fenomena kemiskinan, bukan sebagai pendukung norma-norma budaya yang mendorong adanya beban kehidupan manusia.²⁶

2. IPM (Indek Pembangunan Manusia)

a. Pengertian IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai metrik untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dalam pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM merupakan suatu parameter penilaian yang mengukur kesejahteraan suatu wilayah atau negara dengan mempertimbangkan tiga dimensi utama, yaitu angka harapan hidup pada saat kelahiran, tingkat melek huruf dan lama rata-rata pendidikan, serta kemampuan daya beli penduduk. Dimensi angka harapan hidup diukur untuk mencerminkan aspek kesehatan, sementara dimensi melek huruf dan lama rata-rata sekolah menggambarkan kondisi pendidikan. Terakhir, dimensi kemampuan daya beli digunakan untuk menilai standar hidup. IPM, sebagai indikator yang memberikan gambaran komprehensif tentang kesejahteraan suatu masyarakat atau negara.²⁷

b. Indikator IPM

Kuncoro mengatakan salah satu metrik yang umum digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan manusia adalah *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM berupaya

²⁶ Aeni, "Respon Agama terhadap Kemiskinan."

²⁷ Sanniana Sidabutar, Elidawaty Purba, dan Pawar Darasa Panjaitan, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dankemiskinan Terhadap IPM Kabupaten Simalungun," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 2, no. 2 (November 2020): 86–101, <https://doi.org/10.36985/ekuilnومي.v2i2.69>.

mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan rentang skala dari 0, yang mencerminkan tingkat pembangunan terendah, hingga 1, sebagai indikator pembangunan tertinggi. IPM merupakan indikator holistik yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu "*longevity*" yang mencakup harapan hidup, "*knowledge*" yang mencakup pengetahuan melalui kombinasi melek huruf dewasa dan tingkat pendidikan, serta "*decent standard of living*" yang mencakup standar hidup layak yang diukur dengan PDB riil perkapita.²⁸ Pengukuran dapat dilakukan dengan menggunakan rumus

$$IPM = \sqrt[3]{\text{kesehatan} + \text{pengetahuan} + \text{pengeluaran}} \times 100.$$
²⁹

PBB memiliki konsep dalam pembangunan manusia yang telah ditetapkan Peringkat kinerja pembangunan manusia dilakukan dalam rentang skala 0,0-100, dengan klasifikasi Sangat Tinggi bila nilai IPM melebihi 80,0, klasifikasi Tinggi kedua dengan nilai IPM antara 70-79, klasifikasi Sedang dengan nilai IPM antara 60-69, dan klasifikasi Rendah untuk nilai IPM kurang dari 60.³⁰ Pengukuran dapat dilakukan untuk setiap dimensi diberi bobot yang sama dalam perhitungan IPM, sehingga memungkinkan perbandingan kemajuan di berbagai Negara dalam skala dari 0 hingga 1, dengan angka 1 menandakan tingkat kemajuan terbesar dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia.³¹

3. Tenaga Kerja

a. Pengertian tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja

²⁸ Kuncoro, *EKONOMIKA PEMBANGUNAN*.

²⁹ Assa Faclassuffa dan Eppy Yuliani, "Kajian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia," *Jurnal Kajian Ruang* 1, no. 1 (2021): 49–61, <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19979>.

³⁰ Radiatul Fadila dan Marwan Marwan, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018," *Jurnal Ecogen* 3, no. 1 (5 Maret 2020): 120, <https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i1.8531>.

³¹ Reka Ramadhan, "Pengaruh Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2022," *Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science* 3, no. 01 (2024): 108–18.

adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun-64 tahun.³²

Tenaga kerja menjadi pendorong utama bagi perkembangan ekonomi. Semakin banyak tenaga kerja berkualitas yang tersedia, semakin besar pula hasil produksi yang dapat dihasilkan, sehingga akan memberikan dampak positif pada pendapatan per kapita.³³ Kenaikan pendapatan per kapita, pada gilirannya, akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sebagai modal pembangunan regional dapat menjadi strategi untuk mengatasi tingkat kemiskinan yang ada. Terdapat dua tantangan signifikan, baik di tingkat domestik maupun internasional, yang sulit untuk diprediksi, yaitu menciptakan lapangan kerja yang lebih baik dan aman, serta meningkatkan produktivitas guna meningkatkan standar hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan.³⁴

b. Klasifikasi Tenaga Kerja

Tenaga kerja di kelompokkan menjadi beberapa kriteria yaitu :

1. Berdasarkan penduduk

- a) Semua masyarakat yang dianggap memiliki kemampuan dan kapasitas untuk melakukan pekerjaan, asalkan terdapat permintaan pekerjaan disebut tenaga kerja. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja, orang yang masuk dalam kategori tenaga kerja adalah mereka yang berusia antara 15 - 64 tahun.

³² A Banggolo, *Tenaga Kerja dan Pembangunan* (Jakarta: Jasa Karya, 2017), 1.

³³ Ngruh Gede Dwiky Wirawan dan I Gusti Bagus Indrajaya, "Pengaruh Modal Dan Tenaga Kerja Terhadap Produksi Dan Pendapatan Pada Ukm Pie Susu Di Denpasar," *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 8, no. 2 (2019): 453–85.

³⁴ Lufi Supratiyoningsih dan Ni Nyoman Yuliarini, "Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 11, no. 01 (18 Januari 2022): 1–14, <https://doi.org/10.24843/EEB.2022.v11i01.p01>.

- b) Bukan tenaga kerja adalah Individu yang dipandang tidak memiliki kemampuan atau tidak bersedia untuk bekerja, meskipun ada permintaan pekerjaan, mereka adalah penduduk yang berada di luar rentang usia tertentu, yakni mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003. Contoh kelompok ini mencakup para pensiunan, lanjut usia, dan anak-anak.
2. Berdasarkan batas kerja
 - a) Angkatan kerja merujuk pada bagian penduduk usia produktif, yaitu mereka yang berusia antara 15 hingga 64 tahun, yang saat ini telah memiliki pekerjaan, tetapi mungkin sedang mengalami masa tidak bekerja sementara atau sedang aktif mencari pekerjaan.
 - b) Bukan angkatan kerja merujuk pada penduduk yang umurnya 10 tahun keatas yang memiliki kegiatan sekolah, mengelola rumah tangga dan melakukan aktivitas lainnya di luar kegiatan probadi.³⁵
 3. Berdasarkan kualitasnya
 - a) Tenaga kerja terdidik merupakan pekerja yang memiliki keterampilan khusus dalam suatu bidang, yang diperoleh melalui pendidikan baik formal maupun nonformal. Contoh dari kelompok ini mencakup profesi seperti pengacara, dokter, guru, dan sejenisnya.
 - b) Tenaga kerja terlatih merupakan penduduk yang mempunyai keahlian dalam suatu bidang khusus yang diperoleh melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja ini agar dapat lebih terampil diperlukan latihan secara terus menerus agar dapat menguasai pekerjaan tersebut.

³⁵ Dwiyanto Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), 45.

- c) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih merupakan tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaga saja.³⁶
- c. Indikator tenaga kerja
- Menurut Murthi dan Jhon dalam penelitian Ewa Prassetyo dkk, indikator Tenaga Kerja yaitu:³⁷
- a) Jumlah penduduk berumur 15-64 tahun yang bekerja berdasarkan jenis kelamin.
 - b) Jumlah penduduk berumur 15-64 tahun yang bekerja berdasarkan kelompok umur.
 - c) Jumlah penduduk berumur 15-64 tahun yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan.
- d. Perintah bekerja dalam Islam

Dalam ajaran Islam, diperintahkan untuk bekerja. Umat Islam diajarkan bahwa bekerja memiliki dua dimensi penting. Pertama, bekerja adalah cara agar terwujud kehidupan yang pantas dan untuk memproduksi barang dan jasa yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari yang merujuk pada aspek praktis dan ekonomis dari pekerjaan yang memungkinkan seseorang dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan utama. Kedua, pekerjaan juga diberikan makna spiritual dalam Islam. Manusia diajarkan bahwa bekerja bukan hanya tentang mencari nafkah semata, tetapi juga sebagai peluang untuk melakukan amal shaleh. Agar lebih dekat dengan Allah SWT dapat dilakukan dengan bekerja melalui tindakan-tindakan yang baik, seperti membantu sesama, memberikan bantuan, dan mendukung kebaikan dalam masyarakat. Sehingga, dalam Islam, bekerja tidak hanya dilihat sebagai rutinitas sehari-hari, tetapi sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.³⁸ Perintah bekerja terdapat dalam QS. At-Taubah 105.

³⁶ Dwiyanto Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), 45.

³⁷ Ewa Prassetyo, Yayuk Yuliana, dan Toni Hidayat, "Pengaruh Jumlah Umkm, Jumlah Pendapatan Produk Domestik Bruto Daerah (Pdrb) Dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Deli Serdang," *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 1 (1 Juli 2022): 90–102, <https://doi.org/10.46576/bn.v5i1.2158>.

³⁸ Abd. Basid, "Peningkatan Taraf Hidup Layak Melalui Produktivitas Bekerja Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 21, no. 1 (Januari 2020): 173–92, <https://doi.org/10.14421/qh.2020.2101-09>.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS At-Taubah 105).³⁹

4. ZIS

a. Pengertian ZIS

a) Zakat

Zakat memegang peran yang signifikan dalam prinsip ajaran Islam. Secara etimologis, zakat berasal dari kata yang merujuk pada konsep berkembang (an-namaa), mensucikan (atthaharatu), dan berkah (al-barakatu). Namun, dalam terminologi Islam, zakat sebagai kewajiban mengeluarkan sebagian harta dengan ketentuan tertentu dan memberikannya kepada kelompok khusus yang memenuhi syarat sebagai mustahik, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam pandangan sosiologis Al-Qardawi, ia mengungkapkan bahwa penggunaan dana zakat memiliki dampak sosial dengan memberikan bantuan kepada penerima manfaat (mustahik).⁴⁰

b) Infaq

Hasan menyatakan bahwa zakat dan infaq merupakan gabungan harta yang dikumpulkan dari muzaki yang memiliki keajiban untuk membayar zakat dan orang yang memberikan sumbangan sukarela, dan kemudian harta tersebut akan didistribusikan kembali. Hafidhuddin menjelaskan bahwa istilah "infaq" berasal dari kata "anfaqa" yang artinya mengeluarkan harta untuk keperluan tertentu.

³⁹ Al-Qur'an, *At-Taubah ayat 105, Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an, 2001), 203.

⁴⁰ Gazi dan Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 78.

Secara terminologi, infak merujuk pada tindakan mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang diamanatkan oleh agama kepada orang yang beriman, tanpa mempertimbangkan apakah individu tersebut memiliki penghasilan atau tidak.⁴¹

c) Sedekah

Hafidhuddin mengemukakan bahwa kata "sedekah" bermula dari "shadaqa," yang artinya "benar." Orang yang tekun menyedekahkan hartanya dianggap sebagai orang yang benar-benar beriman kepada Allah SWT. Secara terminologi, sedekah memiliki makna yang sama dengan infak, termasuk dalil-dalil dan syarat-syarat yang berlaku. Namun, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada ruang lingkungannya yaitu infak hanya terkait dengan materi, sedangkan sedekah memiliki cakupan yang lebih luas dan dapat melibatkan sumbangan berupa materi maupun non-materi.⁴²

Menurut Qordawi, sedekah adalah zakat dan zakat adalah sedekah. Meskipun keduanya memiliki makna yang sama, perbedaan utamanya terletak pada kewajiban hukum, di mana zakat wajib sementara sedekah tidak. Sedekah termasuk dalam kategori zakat, tetapi zakat tidak dapat dianggap sebagai sedekah. Kewajiban membayar zakat wajib dilakukan setiap tahun, sedangkan waktunya tidak terbatas untuk melakukan sedekah.⁴³

b. Indikator Zakat

Dalam ajaran Islam, terdapat dua golongan masyarakat yang memiliki perbedaan dalam kekayaan mereka. Kelompok yang memiliki kelebihan harta diwajibkan untuk membagikan sebagian dari rejeki yang telah diberikan oleh Allah melalui pembayaran zakat. Pemberi zakat (muzakki) harus memenuhi beberapa indikator

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, trans. oleh Sari Natulita (Beirut: Muassasah ar Risalah, 2005), 89.

⁴² Debi Novalia, Rinol Sumantri, dan Maya Panorma, "Pengaruh Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Terhadap Tingkat Kemiskinan Sebagai Variabel Intervening Tahun 2015-2019," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (29 Desember 2020): 134, <https://doi.org/10.31602/iqt.v6i2.3455>.

⁴³ Qardhawi, *Fiqh Zakat*.

atau kriteria tertentu. Orang yang berkewajiban membayar zakat yaitu:

1. Beragama Islam
2. Merdeka
3. Berakal Sehat dan Baligh
4. Harta sendiri dan telah mencapai nishab
5. Telah mencapai haul.⁴⁴

c. Asnaf Zakat

Al-Qur'an secara tegas menyebutkan delapan golongan yang layak mendapat zakat, meskipun demikian, para ulama sudah melakukan diskusi dan menafsirkan penjelasan tiap golongan tersebut. Zakat dalam bidang fikih termasuk dalam ranah ijtihad, yang memberi peluang untuk penafsiran yang sesuai dengan kondisi dan zaman tertentu.

1) Fakir

Menurut mazhab Maliki, Syafii, dan Hambali, fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta dan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya melalui pekerjaan. Namun, mazhab Hanafi mengatakan, fakir didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki harta atau pekerjaan, namun pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dilihat dari pandangan pertama dari perspektif ekonomi fakir adalah seseorang yang hidupnya sepenuhnya bergantung pada bantuan zakat.

2) Miskin

Sebagian besar ulama, kecuali mazhab Hanafi, mendefinisikan miskin sebagai seseorang yang mempunyai harta atau pekerjaan, atau memiliki kemampuan untuk bekerja guna mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kehidupan dasarnya.

3) Amil

Amil adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola zakat. Amil dapat berasal dari pemerintah atau lembaga yang mewakili pemerintah. Apabila kita merujuk pada ayat tentang pengumpulan zakat dalam Surat At-Taubah ayat 103, terdapat perintah "ambillah," yang menunjukkan

⁴⁴ Fordebi dan Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam : Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 405-406.

bahwa zakat perlu diserahkan kepada pihak yang akan mengelolanya dengan benar sesuai syariat dan secara ekonomis untuk mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu, para amil diharapkan memiliki sifat profesional dan amanah.⁴⁵

4) Muallaf

Muallaf adalah seseorang yang baru memeluk agama Islam. Melalui pemberian zakat, agar mereka dapat memperkuat keyakinan dan semangat dalam menjalankan ajaran agama.

5) Riqab

Riqab adalah bentuk jamak yang berasal dari kata tunggal "raqqabah," yang merujuk pada leher, ujung kepala, atau bagian atas badan, dan secara terminologi mengacu pada status seorang budak yang dimiliki. Secara umum, para ulama mendefinisikan riqab dalam tiga konteks: pertama, budak yang bersedia untuk dimerdekakan dan menganut agama Islam. Zakat diberikan kepada tuan budak agar budak tersebut dapat memperoleh kemerdekaan. Kedua, penggunaan zakat untuk membeli dan memerdekakan budak. Ketiga, zakat dapat digunakan untuk menebus tawanan.

6) Gharim

Al-Gharimin merupakan istilah jamak untuk gharim, yang merujuk pada orang yang memiliki hutang. Mazhab Syafi'i membagi gharimin menjadi tiga kategori yaitu mereka yang berhutang demi kepentingan diri sendiri atau keluarga, mereka yang berhutang demi kepentingan orang lain, dan seseorang yang memberikan jaminan bagi orang yang berhutang. Namun sebagian ulama menambahkan kategori tambahan melibatkan seseorang yang mengalami bencana yang menyebabkan kerugian harta dan sebagainya.⁴⁶

⁴⁵ Nur Wahyu Ningsih dan Weny Rosilawati, "Implementasi Asnaf Zakat Dalam Pendistribusian Aset Zakat Berbasis Pemerataan Dan Keadilan," *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 23, no. 1 (2022): 1–6.

⁴⁶ M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad Arifai, "Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam," *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 2 (4 Desember 2021): 179–90, <https://doi.org/10.56644/adl.v2i2.29>.

7) Fi Sabilillah

Fisabilillah merujuk kepada orang yang berjuang di jalan Allah. Ulama telah memberikan definisi berdasarkan mazhab-mazhab tertentu untuk menyatakan siapa yang berhak menerima zakat dengan kategori fi sabilillah. Pertama, Mazhab Hanafi mengartikan fi sabilillah sebagai amalan-amalan yang mendekatkan diri dan taat kepada Allah, dengan syarat adanya sifat kefakiran. Kedua, dalam Mazhab Maliki, fi sabilillah terkait dengan tujuan perang, jihad, dan hal-hal terkait, tidak hanya terbatas pada tentara, melainkan juga melibatkan persiapan perang dan dapat menerima zakat bahkan dari orang kaya. Ketiga, Mazhab Syafi'i memfokuskan fi sabilillah hanya pada jihad, terutama untuk tentara yang tidak menerima gaji dan hal terkait, bahkan jika mereka kaya. Keempat, Mazhab Hambali hampir sama dengan definisi Mazhab Syafi'i, yaitu terkait dengan tentara sukarela yang tidak menerima gaji dari pemerintah atau yang menerima gaji tetapi tidak mencukupi kebutuhan untuk berperang, meskipun kaya. Ulama kontemporer memberikan definisi yang lebih luas untuk fi sabilillah karena terminologi ini mencakup segala usaha kebaikan untuk meningkatkan dakwah Islam.

8) Ibn Sabil

Ibnu Sabil adalah seorang Muslim yang kehabisan bekal ketika memulai perjalanan atau sedang melakukan perjalanan yang membawa manfaat dan sesuai dengan syariat Islam.⁴⁷

d. Zakat untuk mengurangi kemiskinan dalam Islam

Sistem ekonomi modern seperti zaman sekarang zakat berpotensi dalam penurunan kemiskinan ketika para muzakki sadar bahwa mereka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Zakat dapat berupa zakat mal dan zakat fitrah. Dalam Surah

⁴⁷ Arif Ali Arif, Muntaha Artalim Zaim, dan Hambari, "Asnaf Zakat Dan Pendistribusiannya: Tinjauan Fikih Dan Ekonomi Kontemporer," *Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2020): 9–15, <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/KASABA>.

Al-Baqarah (2:267) berbicara tentang pentingnya memberikan zakat yang diperoleh dari usaha yang baik. Ayat ini mengajarkan bahwa berbagi dengan orang yang membutuhkan adalah tindakan yang dianugerahkan oleh Allah, dan kita tidak boleh memilih yang buruk atau mengambilnya dengan mata tertutup terhadap kebutuhan mereka. Ayat ini dapat merujuk pada tingkat kemiskinan di Indonesia. Banyak individu dan keluarga yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ayat ini mengingatkan bahwa kepedulian sosial, pengorbanan, dan berbagi dengan yang kurang beruntung adalah nilai-nilai yang mendorong kita untuk membantu mengurangi kemiskinan. Upaya pemerintah dan masyarakat sipil dalam memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, memberikan akses yang lebih baik ke pendidikan dan kesehatan, dan menciptakan peluang ekonomi adalah wujud nyata dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat ini.⁴⁸ Pengentasan kemiskinan dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”* (QS Al-Baqarah Ayat 267).⁴⁹

5. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan yang umumnya dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita.

⁴⁸ Lukman Hakim dan Ahmad Danu Syaputra, “Al-Qur’an dan Pengentasan Kemiskinan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (29 Oktober 2020): 629, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1310>.

⁴⁹ Al-Qur’an, *Al-Baqarah ayat 267, Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur’an, 2001), 45.

Pendapatan perkapita mencakup agregat nilai barang dan jasa yang tersedia secara rata-rata untuk penduduk suatu negara selama suatu periode tertentu. Sukirno mengartikulasikan konsep ini sebagai ukuran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk suatu negara atau wilayah selama periode tertentu, biasanya setahun. Metode perhitungan pendapatan per kapita melibatkan pembagian total pendapatan daerah dengan jumlah penduduknya. Sebagai idealnya, angka ini seharusnya dihitung berdasarkan pembagian total pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Penyajian angka pendapatan per kapita dapat dilakukan dalam bentuk harga berlaku atau harga konstan, bergantung pada kebutuhan analisis yang dilakukan.

Pendapatan per kapita sering difungsikan sebagai parameter untuk menilai tingkat kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu negara atau wilayah. Sebagai indikator, pendapatan per kapita secara luas digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat.⁵⁰

b. Jenis Pendapatan Perkapita

Menurut Sukirno Pendapatan dibagi beberapa jenis diantaranya adalah:

1. Pendapatan Pribadi

Pendapatan pribadi merupakan segala jenis penerimaan keuangan, termasuk yang diperoleh tanpa melibatkan aktivitas tertentu, diterima oleh penduduk suatu negara. Konsep pendapatan pribadi, dapat disimpulkan bahwa pembayaran pindahan juga masuk dalam kategori ini. Jenis pembayaran ini merupakan alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah kepada berbagai kelompok masyarakat, di mana penerimaannya tidak tergantung pada pemberian balas jasa atau kontribusi usaha sebagai imbalan.

2. Pendapatan disposibel

Pendapatan disposibel merupakan pendapatan yang dikurangi pajak, nilai yang tersisa itu disebut pendapatan disposibel. Jadi, pada dasarnya, Pendapatan dispoebel diartikan sebagai pendapatan yang bisa dimanfaatkan penerima untuk memenuhi keinginannya, yang

⁵⁰ Rosaria Sihite, "Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Konsumsi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah," *GROWTH* 5, no. 2 (12 Februari 2022): 125–36.

mencakup semua rumah tangga dalam perekonomian, untuk melakukan pembelian barang dan jasa.⁵¹

c. Indikator pendapatan perkapita

Pendapatan perkapita dapat diukur dengan pendapatan negara dibagi jumlah penduduk. Semakin besar nilai pendapatan perkapita maka semakin sejahtera suatu negara dan berhasil dalam pembangunan ekonomi.⁵² Terdapat beberapa indikator pada pendapatan perkapita adalah sebagai berikut:⁵³

1. Permintaan agregat dan penawaran agregat

Permintaan agregat mencerminkan interkoneksi antara permintaan keseluruhan terhadap barang dan jasa pada tingkat harga yang spesifik. Istilah permintaan agregat mengacu pada total barang dan jasa yang akan diperoleh oleh berbagai sektor ekonomi pada tingkat harga tertentu, sementara penawaran agregat mencerminkan relasi antara total penawaran barang dan jasa yang disuguhkan oleh perusahaan-perusahaan pada tingkat harga yang ditetapkan.

2. Konsumsi dan tabungan

Konsumsi merujuk pada total pengeluaran untuk mendapatkan barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama periode satu tahun. Di sisi lain, tabungan merupakan sebagian dari pendapatan yang tidak dialokasikan untuk konsumsi. Keterkaitan antara tabungan, konsumsi, dan pendapatan sangat dekat. Keynes mengemukakan pandangan psikologis konsumsi, yang membahas perilaku masyarakat dalam mengonsumsi berdasarkan pendapatan. Menurut Keynes, semakin meningkatnya tingkat konsumsi dan tabungan, semakin besar pendapatan yang diperoleh.

3. Investasi

Pengeluaran yang digunakan untuk investasi merupakan salah satu bentuk komponen penting pengeluaran agregat.

⁵¹ S Sukirno, *Teori Pengantar Makro Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 36.

⁵² Bima Prasetya Kumara, Toto Gunarto, dan Arivin Ratih, "Disparitas dan Konvergensi Pendapatan Perkapita Propinsi di Kawasan Timur Indonesia," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 21, no. 1 (2021): 46–56, <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7166>.

⁵³ Nurlaila Hanum dan Sari Sarlia, "Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Konsumsi Di Provinsi Aceh," *Jurnal Samudra Ekonomika* 3, no. 1 (2019): 84–92.

d. Manfaat pendapatan perkapita

Manfaat dari perhitungan pendapatan per kapita sebagai ukuran ekonomi yang menilai seberapa sejahteranya penduduk dalam suatu wilayah yaitu:

1. Memonitor perbandingan tingkat kualitas hidup masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun.
2. Menjadi data yang dapat membandingkan tingkat kesejahteraan antar negara.
3. Menjadi pembanding tingkat standar hidup antar negara.
4. Data yang dapat merumuskan kebijakan di bidang ekonomi. Pendapatan per kapita dapat dijadikan pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan IPM, tenaga kerja, ZIS, kemiskinan dan pendapatan.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Lufi Supratyoningih dan Ni Nyoman Yuliarmi (2022). ⁵⁴	Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali.	Investasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan sedangkan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi	Menggunakan variabel independen Tenaga Kerja dan variabel dependen kemiskinan. Menggunakan metode penelitian kuantitatif.	Peneliti menambahkan dua variabel independen yaitu IPM dan ZIS serta variabel moderating pendapatan yang tidak dibahas oleh peneliti terdahulu. Perbedaan lain juga terdapat pada

⁵⁴ supratyoningih Dan Yuliarmi, “Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali.”

			berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan		subjek penelitian yaitu Bali pada penelitian terdahulu dan Indonesia pada penelitian ini.
2	Dessy Chayani Elisabeth (2020). ⁵⁵	Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.	Tenaga Kerja tidak ditemukan pengaruh antara tenaga kerja terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.	Menggunakan variabel independen Tenaga Kerja dan variabel dependen kemiskinan. Menggunakan metode kuantitatif	Peneliti menambahkan variabel ZIS dalam penelitian ini serta variabel moderating pendapatan yang tidak dibahas pada penelitian terdahulu. Perbedaan lain terletak pada subjek penelitian yaitu Sumatera Utara penelitian terdahulu sedangkan Indonesia sebagai penelitian sat ini
3	Shidiq Ramdan	Faktor Faktor yang	Indeks Pembangunan	Menggunakan variabel	Peneliti menambahkan

⁵⁵ Chayani Elisabeth Sitanggang, "Analysis Of Poverty Influence Onhuman Development Index And Laborin North Sumatera Province."

	Dinata, Mahendra Romus, dan Yanti (2020). ⁵⁶	Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2003-2018.	an Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan .	independen IPM dan variabel dependen kemiskinan. Menggunakan metode kuantitatif.	n variabel independen tenaga kerja dan ZIS serta variabel moderating pendapatan yang tidak dibahas pada penelitian ini. Perbedaan lain terdapat pada pengambilan data pada penelitian terdahulu mulai tahun 2003-2018 dan subjek penelitian di Riau sedangkan penelitian ini menggunakan data 2007-2022 di Indonesia.
4	Lily Leonita dan Rini Kurnia Sari (2019). ⁵⁷	Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan	Pengujian secara parsial menunjukkan tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh laju	Menggunakan variabel independen IPM dan variabel dependen kemiskinan. Menggunakan	Peneliti menambahkan variabel independen tenaga kerja dan ZIS serta variabel moderating

⁵⁶ Dinata, Romus dan Yanti, “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau Tahun 2003-2018.”

⁵⁷ Leonita dan Sari, “Pengaruh Pdrb, Pengangguran Dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.”

		di Indonesia.	PDRB dan pengangguran. Sedangkan IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.	n metode kuantitatif dengan Indonesia sebagai subjek penelitian.	pendapatan yang tidak dibahas pada penelitian terdahulu. Perbedaan lain terdapat pada pengambilan data yaitu tahun 2011-2017 pada penelitian terdahulu sedangkan pada penelitian ini menggunakan tahun 2007-2022.
5	Bariyyatin Nafi'ah (2021). ⁵⁸	Analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengentasan kemiskinan di Indonesia (2016-2019).	Variabel ZIS memiliki pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan sedangkan IPM dan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan Kemiskinan.	Menggunakan variabel independen ZIS dan IPM serta variabel dependen Kemiskina. Menggunakan metode kuantitatif dan Indonesia sebagai subjek penelitian.	Peneliti menambahkan variabel independen tenaga kerja dan variabel moderating pendapatan yang tidak dibahas pada penelitian terdahulu. Perbedaan lain terletak pada pengambilan data pada penelitian terdahulu

⁵⁸ Nafi'ah, "Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (2016- 2019)."

					2016-2019 sedangkan penelitian ini tahun 2007-2022.
6	Hanifah Khusnul Karimah, dan Siti Aisyah (2023). ⁵⁹	Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dan Indikator Ekonomi Makro Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2018-2020.	Terdapat pengaruh signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan, dan tidak ada pengaruh signifikan antara penyaluran ZIS dan juga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan.	Menggunakan variabel independen IPM dan ZIS serta variabel dependen kemiskinan. Menggunakan metode kuantitatif.	Peneliti menambahkan variabel independen tenaga kerja dan variabel moderating pendapatan yang tidak dibahas pada penelitian terdahulu. Perbedaan lain terdapat pada pengambilan data dan subjeknya yaitu tahun 2018-2020 di Aceh pada penelitian terdahulu sedangkan pada penelitian ini tahun 2007-2022 di Indonesia.
7	Sodik Dwi Purnomo dan	Hubungan pendidikan	Pendapatan perkapita	Menggunakan variabel	Peneliti menambahkan

⁵⁹ Karimah dan Aisyah, “Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dan Indikator Ekonomi Makro Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2018-2020.”

	Suharno (2020). ⁶⁰	dan kemiskinan: pendekatan variabel mediasi pendapatan perkapita.	dapat memediasi hubungan pendidikan terhadap kemiskinan .	dependen kemiskinan dan variabel moderating pendapatan. Menggunakan metode kuantitatif.	n variabel independen IPM, tenaga kerja dan ZIS yang tidak dibahas pada penelitian terdahulu. Perbedaan lain terdapat pada pengambilan data dan subjeknya yaitu pada penelitian terdahulu tahun 2000-2018 di Yogyakarta sedangkan pada penelitian ini tahun 2007-2022 di Indonesia.
8	Salsa Amanda dan Muhammad Anwar Fathoni (2023). ⁶¹	Pengaruh dana ZIS dan Inflasi terhadap tingkat kemiskinan dengan mediasi pertumbuhan ekonomi.	Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDB tidak dapat memediasi ZIS dan inflasi terhadap kemiskinan	Menggunakan variabel independen ZIS dan variabel dependen kemiskinan. Menggunakan metode kuantitatif.	Peneliti menambahkan variabel independen IPM dan tenaga kerja serta pendapatan sebagai variabel moderating yang tidak

⁶⁰ Purnomo, Istiqomah, Dan Suharno, “Hubungan Pendidikan Dan Kemiskinan.”

⁶¹ Amanda dan Anwar Fathoni, “Pengaruh Dana ZIS dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Mediasi Pertumbuhan Ekonomi.”

					dibahas pada penelitian terdahulu. Perbedaan lain terdapat pada pengambilan data yaitu penelitian terdahulu tahun 2012-2021 sedangkan penelitian ini 2007-2022.
--	--	--	--	--	---

Berdasarkan pada temuan penelitian terdahulu yang telah dilakukan menyatakan bahwa kemiskinan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan belum ada penelitian yang menggabungkan variabel IPM, Tenaga Kerja dan ZIS terhadap Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2007-2022 dengan Novelty penelitian ini dengan menggunakan Pendapatan sebagai variabel moderating karena dalam teori Neo-liberal sebagai teori kemiskinan, kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya sehingga kemiskinan dapat teratasi. Pendapatan perkapita memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pendapatan per kapita meningkat hal itu akan menyebabkan seseorang memiliki daya beli yang meningkat sehingga dapat mendorong konsumsi, investasi dan aktivitas ekonomi meningkat sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi..⁶²

C. Kerangka Berpikir

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang pendapatannya tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar sehingga menyebabkan seseorang memiliki kualitas hidup yang rendah.⁶³ Penelitian ini menggunakan teori neo-liberal yang menghasilkan beberapa variabel penelitian. IPM dan Pendapatan diambil berdasarkan teori neo-liberal yang menjelaskan bahwa tumbuhnya ekonomi dapat mengurangi kemiskinan secara efektif

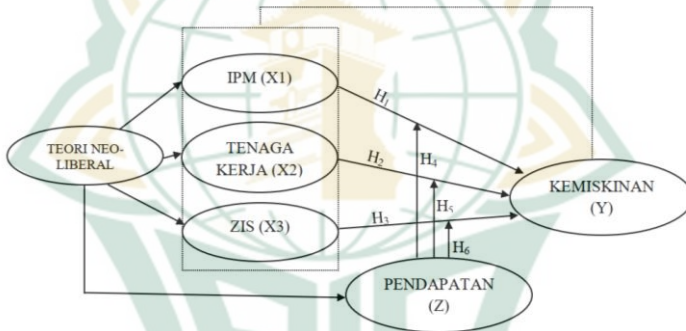
⁶² Sari, “Analisis Tingkat Kemiskinan Masyarakat Di Provinsi Sumatera Utara.”

⁶³ Devi Arfiani, *Berantas Kemiskinan* (Semarang: Alprin, 2019), 5-6.

yang ditunjukkan dalam teori neo-liberal bahwa memacu pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya dapat mengurangi kemiskinan. Serta variabel tenaga kerja yang diambil dari teori neo-liberal yang menjelaskan bahwa mekanisme pasar dapat mengurangi kemiskinan.⁶⁴ Sedangkan ZIS diambil berdasarkan teori neo-liberal keadilan sosial yang dapat mengurangi kemiskinan.⁶⁵

Pada penelitian ini kemiskinan menjadi variabel dependen sedangkan IPM, tenaga kerja dan ZIS berperan menjadi variabel independen, dengan pendapatan sebagai variabel moderating yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen terhadap dependen.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan atau dugaan yang dirumuskan oleh seorang peneliti berdasarkan pemikiran logis dan dasar teori yang relevan. Fungsi utama hipotesis adalah membimbing arah penelitian dan menguji keabsahan dugaan yang diajukan. Hipotesis menjelaskan hubungan antar variabel yang akan diuji secara empiris. Proses pengujian hipotesis bermanfaat dalam menentukan apakah hasil dari penelitian yang telah dilakukan mendukung atau menolak hipotesis yang telah dirumuskan.⁶⁶ Berdasarkan pada kerangka pemikiran di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

⁶⁴ Sari, “Analisis Tingkat Kemiskinan Masyarakat Di Provinsi Sumatera Utara.”
⁶⁵ El Islami dan Fitrianto, “Pengaruh Penyaluran Dana ZIS, Inflasi, Dan Gini Ratio Terhadap Tingkat Kedalaman Kemiskinan Satu Dekade.”
⁶⁶ Nurlina T Muhyiddin, M. Irfan Tarmizi, dan Anna Yulianita, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial:Teori,Konsep, dan Rencana Proposal* (Jakarta: Salemba Empat, 2018), 80.

1. IPM terhadap Kemiskinan

Salah satu upaya yang mungkin dilakukan untuk mendorong kemajuan dalam sektor industri adalah melalui pembangunan sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu penanda yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi pembangunan manusia. Penggunaan indikator tersebut dapat berdampak pada tingkat produktivitas masyarakat, ketika IPM rendah, dapat mengakibatkan penurunan produktivitas kerja masyarakat. Keadaan ini kemudian berpotensi meningkatkan jumlah penduduk yang hidup dalam kondisi kemiskinan.⁶⁷ Menurut teori Neo-liberal kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya sehingga kemiskinan dapat teratasi.⁶⁸

Penelitian Shidiq Ramdan Dinata, Mahendra Romus dan Yanti Menunjukkan hasil bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan karena IPM sangat menentukan kualitas manusia dan mengetahui sejauh mana pembangunan yang telah dilakukan jika IPM naik maka kemiskinan akan berkurang.⁶⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Shidiq dkk didukung dengan adanya penelitian Radiatul Fadila dan Marwan yang menunjukkan hasil bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan karena adanya peningkatan sumber daya manusia di suatu daerah maka akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah terkait yang nantinya juga akan mempengaruhi produktivitas dari sumber daya manusia tersebut.⁷⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Ema Dian Ristika dkk yang menunjukkan hasil IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan karena IPM yang

⁶⁷ B Dharmmayukti, T Rotinsulu, dan A Niode, "Analisis Pengaruh Inflasi Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado Tahun 2004-2019," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 21, no. 05 (2021): 98.

⁶⁸ Sari, "Analisis Tingkat Kemiskinan Masyarakat Di Provinsi Sumatera Utara."

⁶⁹ Dinata, Romus dan Yanti, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau Tahun 2003-2018."

⁷⁰ Fadila dan Marwan, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018."

dilakukan di Indonesia belum memberikan manfaat secara menyeluruh untuk semua kalangan masyarakat.⁷¹

Namun terdapat perbedaan hasil pada penelitian Lily Leonita dan Rini Kurnia Sari yang menunjukkan hasil bahwa IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan karena aspek IPM belum merata di semua kalangan sehingga standar hidup yang layak masih rendah dikalangan rakyat miskin.⁷²

Hasil penelitian Lily dan Rini didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Ayu Salsabilla, Indri Arrafi Juliannisa dan Nunuk Triwahyuningtyas yang menunjukkan hasil IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan karena sektor lapangan kerja yang mendominasi di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta yakni sektor pertanian yang tidak membutuhkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, banyaknya lansia yang tidak produktif dan standar hidup layak yang rendah sehingga kemiskinan tidak selalu dipengaruhi oleh tingginya IPM.⁷³

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu IPM berpotensi untuk menurunkan kemiskinan. Dengan menaikkan IPM dapat mengurangi kemiskinan sehingga dapat dirumuskan hipotesis:

H₁: IPM berpengaruh terhadap kemiskinan.

2. Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dalam sektor produktivitas adalah dengan melalui tenaga kerja. Meningkatnya tenaga kerja akan menambah produktivitas yang dihasilkan. Semakin banyak penyerapan tenaga kerja maka dapat mengurangi angka

⁷¹ Ema Dian Ristika, Wiwin Priana Primandhana, dan Mohammad Wahed, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur," *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 12, no. 2 (15 November 2021): 129, <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i2.254>.

⁷² Leonita dan Sari, "Pengaruh PDRB, Pengangguran Dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia."

⁷³ Salsabilla, Juliannisa, dan Triwahyuningtyas, "Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta."

kemiskinan.⁷⁴ Menurut teori Neo-liberal kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya sehingga kemiskinan dapat teratasi.⁷⁵

Penelitian Lufi Supratyoningasih dan Ni Nyoman Yuliarmi menunjukkan hasil bahwa tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan karena semakin banyak jumlah tenaga kerja akan meningkatkan produktivitas sehingga akan meningkatkan PDRB perkapita.⁷⁶

Penelitian tersebut didukung dengan adanya penelitian dari Rahma Aprillia dan Rr.Retno Sugiharti yang menunjukkan hasil tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan karena setiap naiknya jumlah tenaga kerja maka akan mengurangi tingkat kemiskinan.⁷⁷

Selain Rahma dan Retno hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Adelia Wahyu Apriliana dan Wiwin Priana Primandhana yang menyatakan tenaga kerja berpengaruh terhadap kemiskinan dikarenakan semakin banyak tenaga kerja yang terserap diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan.⁷⁸

Namun terdapat perbedaan hasil pada penelitian Dessy Chayani Elisabeth yang menunjukkan bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap kemiskinan karena IPM dan tenaga kerja hanya mempengaruhi 6% kemiskinan di Sumatra Utara sedangkan 94% kemiskinan tersebut dipengaruhi oleh faktor yang lain.⁷⁹

Penelitian yang dilakukan Dessy didukung dengan adanya hasil penelitian Taufik Hidayat menyatakan tenaga

⁷⁴ Andi Lopa Ginting, “Dampak Angka Harapan Hidup dan Kesempatan Kerja Terhadap Kemiskinan,” *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)* 7, no. 1 (14 Juni 2020): 42, <https://doi.org/10.24252/ecc.v7i1.13197>.

⁷⁵ Sari, “Analisis Tingkat Kemiskinan Masyarakat Di Provinsi Sumatera Utara.”

⁷⁶ Supratyoningasih dan Yuliarmi, “Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali.”

⁷⁷ Aprilia dan Sugiharti, “Pengaruh Pendidikan, Tenaga Kerja dan Kesehatan terhadap Kemiskinan (Studi Kasus pada Provinsi Bali).”

⁷⁸ Adelia Wahyu Apriliana dan Wiwin Priana Primandhana, “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur,” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 7 (5 Juli 2023): 4752–59, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i7.12856>.

⁷⁹ Chayani Elisabeth Sitanggang, “Analysis Of Poverty Influence Onhuman Development Index And Laborin North Sumatera Province.”

kerja tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan nasional yang tinggi atau daerah maka semakin besarlah harapan untuk pembukaan kapasitas produksi baru yang tentu saja akan menyerap tenaga kerja baru.⁸⁰

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa strategi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam sektor produktivitas memiliki potensi besar dalam mengurangi angka kemiskinan. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis:

H₂: Tenaga Kerja berpengaruh terhadap Kemiskinan.

3. ZIS terhadap Kemiskinan

Salah satu metode untuk mengurangi tingkat kemiskinan dalam umat Muslim adalah dengan mengalokasikan dana zakat kepada kelompok yang membutuhkan, yang dikenal sebagai mustahik zakat. Mustahik zakat adalah golongan yang berhak menerima zakat. Proses distribusi zakat melibatkan pemberian sebagian dari pendapatan muzaki, yaitu orang yang wajib membayar zakat, kepada mustahik zakat. Dengan demikian, zakat dapat menjadi sarana untuk mengatasi isu kemiskinan dari perspektif pendapatan. Selain itu, diharapkan bahwa penyaluran dana zakat dapat berperan dalam mengurangi disparitas pendapatan sosial.⁸¹

ZIS dapat dihubungkan dengan teori neo-liberal yang menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan karena perbuatannya sendiri. Orang miskin merasa dirinya sudah cukup dengan menggantungkan kebutuhan melalui pemberian orang lain tanpa adanya usaha untuk bangkit dari kemiskinan.⁸²

Penelitian Ira Humaira Hany dan Dina Islamiyati menunjukkan hasil bahwa ZIS berpengaruh negatif dan

⁸⁰ Taufik Hidayat, "Analisis Indeks Pembangunan Manusia dan Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara," *JUMSI : Jurnal Manajemen Akuntansi* 3, no. 3 (2023): 1480–87.

⁸¹ Khairul Amri, "Pengaruh Zakat dan Kesempatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Aceh," *Al-Muzara'ah* 7, no. 2 (6 Januari 2020): 57–70, <https://doi.org/10.29244/jam.7.2.57-70>.

⁸² El Islami dan Fitrianto, "Pengaruh Penyaluran Dana ZIS, Inflasi, Dan Gini Ratio Terhadap Tingkat Kedalaman Kemiskinan Satu Dekade."

signifikan terhadap kemiskinan karena penyaluran ZIS dapat membantu perekonomian sehingga kemiskinan menurun.⁸³

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ira dan Dina didukung dengan adanya hasil penelitian dari Bariyyatin Nafi'ah yang menunjukkan hasil ZIS memiliki pengaruh terhadap kemiskinan karena zakat dapat berpotensi ekonomi jika digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang berguna bagi masyarakat.⁸⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Nafi'ah didukung dengan adanya penelitian Eris Munandar, Mulia Amirullah, Nila Nurochani yang menyatakan ZIS berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan karena zakat sangat berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan.⁸⁵

Namun terdapat perbedaan hasil, pada penelitian Hanifah Khusnul Karimah dan Siti Aisyah yang menunjukkan hasil ZIS tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan karena dana ZIS tidak sebanding dengan kebutuhan pokok masyarakat sehingga kurang efektif untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia.⁸⁶

Penelitian yang dilakukan Hanifah dan Aisyah didukung dengan penelitian Ayu Sindi Widiastuti dan Kosasih yang menyatakan ZIS tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena dana ZIS yang didistribusikan oleh lembaga zakat tidak efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.⁸⁷

Berdasarkan pada tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pengalokasian dana zakat

⁸³ Ira Humaira Hany Dina Islamiyati, "Pengaruh ZIS dan Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi* 25, no. 1 (11 Maret 2020): 118, <https://doi.org/10.24912/je.v25i1.631>.

⁸⁴ Nafi'ah, "Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (2016- 2019)."

⁸⁵ Eris Munandar, Mulia Amirullah, dan Nila Nurochani, "Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan," *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (21 Januari 2020): 25–38, <https://doi.org/10.24042/al-mal.v1i1.5321>.

⁸⁶ Karimah dan Aisyah, "Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dan Indikator Ekonomi Makro Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2018-2020."

⁸⁷ Ayu Sindi Widiastuti dan Kosasih, "Pengaruh ZIS, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 4, no. 1 (30 April 2021): 80–90, <https://doi.org/10.31949/maro.v4i1.973>.

kepada kelompok yang membutuhkan, atau mustahik zakat, dapat menjadi metode efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis :

H₃: ZIS berpengaruh terhadap Kemiskinan.

4. Pendapatan memoderasi IPM terhadap kemiskinan

Peran pendapatan dalam mengurangi kemiskinan sangat penting. Tujuan dari pembangunan untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan melalui kenaikan pendapatan sehingga masyarakatnya akan sejahtera dan terjaga. Untuk meningkatkan IPM dapat melalui pendapatan, pendapatan yang meningkat akan meningkatkan IPM yang akan mengurangi kemiskinan.⁸⁸ Berdasarkan teori Neo-liberal sebagai teori kemiskinan, kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya sehingga kemiskinan dapat teratasi.⁸⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Ernestus Florian Lamaile menunjukkan hasil pendapatan perkapita berpengaruh positif dan sangat signifikan antara pertumbuhan pendapatan per kapita terhadap penduduk miskin. Terdapat dua cara yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita, yaitu dengan meningkatkan pendapatan nasional dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Dengan kata lain, jika laju pertumbuhan penduduk lebih kecil dari pertumbuhan pendapatan nasional, maka pendapatan per kapita akan meningkat.⁹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Ernestus didukung dengan penelitian yang dilakukan Sinta dan Eny Fahrati yang menyatakan pendapatan perkapita menjadi faktor yang paling dominan untuk mempercepat turunnya angka kemiskinan.⁹¹

Penelitian yang dilakukan Sinta dan Eny didukung dengan penelitian Deljansen Yohanes Thesia dan Ni Luh

⁸⁸ Wicaksana dan Primandhana, "Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Sektor Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Probolinggo."

⁸⁹ Sari, "Analisis Tingkat Kemiskinan Masyarakat Di Provinsi Sumatera Utara."

⁹⁰ Ernestus Florian Lamaile, "Pengaruh Pertumbuhan Umkm, Indeks Keterbukaan Perdagangan, Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di 5 Negara Asean," *J-Rema* 1, No. 3 (2022): 38.

⁹¹ Sinta Sinta Dan Eny Fahrati, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Perkapita Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2019," *Jiep: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 5, No. 1 (31 Mei 2022): 81, <https://doi.org/10.20527/Jiep.V5i1.5501>.

Karmini menyatakan bahwa semakin banyak atau tingginya pendapatan per kapita yang diterima suatu daerah, maka akan dapat digunakan untuk membuka lapangan kerja maupun fasilitas penunjang yang dapat menyerap tenaga kerja, sehingga tingkat kemiskinan akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah pendapatan per kapita, maka akan semakin mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat di suatu daerah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa meningkatnya pendapatan per kapita akan menurunkan angka tingkat kemiskinan.⁹²

Penelitian yang dilakukan oleh Robiansyah menunjukkan hasil bahwa pendapatan perkapita tidak dapat memoderasi hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat kemiskinan, sedangkan pendapatan dapat memoderasi tenaga kerja terhadap penurunan tingkat kemiskinan.⁹³

Penelitian yang dilakukan oleh Bhupendra Badgaiyan menunjukkan hasil bahwa pendapatan tidak dapat memoderasi hubungan IPM terhadap Kemiskinan.⁹⁴

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa dengan menaikkan IPM melalui pendapatan dapat mengurangi kemiskinan. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis:

H₄: Pendapatan mampu memoderasi IPM terhadap Kemiskinan.

5. Pendapatan memoderasi tenaga kerja terhadap kemiskinan

Kurangnya pendapatan akan memberikan efek buruk terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang menurun karena tidak bekerja sehingga tidak mendapatkan pendapatan. Dengan tenaga kerja masyarakat dapat menghasilkan pendapatan sehingga tingkat kemiskinan dapat

⁹² Deljansen Yohanes Thesia Dan Ni Luh Karmini, “Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Pertumbuhan Umkm Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali,” *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 11, No. 3 (3 Maret 2022): 271–80.

⁹³ Robiansyah, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Penyerapan Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan Dengan Pendapatan Perkapita Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara),” *Kinerja* 12, No. 2 (2019): 131–39.

⁹⁴ Bhupendra Badgaiyan, “Looking at Human Development Index through the lens of Intensity of Multidimensional poverty and Income,” 3 Juni 2022, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35834.77766>.

berkurang.⁹⁵ Berdasarkan teori Neo-liberal sebagai teori kemiskinan, kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya sehingga kemiskinan dapat teratasi.⁹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman dan Muh. Fiqram Alamsyah menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat migran di kota Makassar karena Rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidupnya, sehingga dapat dikatakan seseorang dengan pendapatan yang rendah disebut masyarakat miskin.⁹⁷

Penelitian Rahman dan Fiqram sejalan dengan penelitian yang dilakukan Made Tomy Widiarsana dan Luh Putu Aswitari yang menyatakan Pendapatan perkapita masyarakat di suatu daerah dapat dijadikan suatu parameter kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ketika pendapatan perkapita naik maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan mudah sehingga kemiskinan dapat berkurang.⁹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Murbanto Sinaga, dkk menyatakan pendapatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan karena pendapatan yang tinggi meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga kebutuhan mendasar, baik makanan maupun non makanan dapat terpenuhi. Jika setiap orang memiliki pendapatan dan mampu memenuhi kebutuhan mendasar, maka tingkat kesejahteraan akan meningkat, sebaliknya jumlah penduduk miskin akan berkurang. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pendapatan per kapita memiliki peranan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan di Kepulauan Nias. Oleh

⁹⁵ Wenny Tri Septiani, Zamzami Zamzami, dan Candra Mustika, "Analisis pengaruh pendapatan perkapita dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera," *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* 8, no. 3 (5 September 2019): 135–48, <https://doi.org/10.22437/pdpd.v8i3.7351>.

⁹⁶ Sari, "Analisis Tingkat Kemiskinan Masyarakat Di Provinsi Sumatera Utara."

⁹⁷ Abdul Rahman dan Muh Fiqram Alamsyah, "Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Konsumsi Terhadap Kemiskinan Masyarakat Migran Di Kota Makassar Jurnal *EcceS*" 6 (2019).

⁹⁸ Made Tomy Widiarsana dan Aswitari Luh Putu, "Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pendapatan Perkapita, Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali," *E-Jurnal EP Unud* 11, no. 5 (2022): 1973–99.

karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah progresif dalam meningkatkan produksi, sehingga pendapatan per kapita terus bertumbuh.⁹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Robiansyah menyatakan pendapatan perkapita selain berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan juga memoderasi pengaruh penyerapan angkatan kerja terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Untuk itu, disarankan kepada pengambil kebijakan publik agar mampu meningkatkan terus secara maksimal untuk menyerap angkatan kerja yang ada serta mendorong untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sehingga harapannya ini akan mampu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bulungan.¹⁰⁰

Namun terdapat penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Azis Maulana dan Aan Julia yang menyatakan pendapatan perkapita berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar Pendapatan Perkapita yang diperoleh suatu kota, belum tentu dapat mengurangi Tingkat Kemiskinan pada kota tersebut. Hal ini terjadi karena Pendapatan Perkapita suatu daerah biasanya tidak diprioritaskan untuk penanggulangan kemiskinan, melainkan digunakan untuk perbaikan infrastruktur dari daerah yang bersangkutan.¹⁰¹

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan melalui tenaga kerja dapat menjadi kunci dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan secara langsung berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis:

H₅: Pendapatan mampu memoderasi Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan.

⁹⁹ Sinaga dkk., “Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Per Kapita Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kepulauan Nias.”

¹⁰⁰ Robiansyah, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Penyerapan Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan Dengan Pendapatan Perkapita Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara),” *Kinerja* 12, no. 2 (2019): 131–39.

¹⁰¹ Muhamad Azis Maulana, Aan Julia, dan Ade Yunita Mafruhah, “Pengaruh Indeks Pendidikan, Gini Rasio, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Perkapita terhadap Tingkat Kemiskinan di Enam Provinsi Indonesia Tahun 2015-2019,” *Bandung Conference Series: Economics Studies* 2, no. 1 (15 Januari 2022), <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i1.300>.

6. Pendapatan memoderasi ZIS terhadap kemiskinan

Untuk mengurangi kemiskinan dapat dengan melalui ZIS. Pendistribusian ZIS dapat membantu mengurangi kemiskinan. Masyarakat yang memiliki pendapatan lebih berdasarkan dengan orang yang wajib berzakat. Pendistribusian zakat akan diberikan kepada masyarakat miskin sehingga dapat menambah pendapatan dan akan mengurangi tingkat kemiskinan.¹⁰² Berdasarkan teori Neo-liberal sebagai teori kemiskinan, kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya sehingga kemiskinan dapat teratasi.¹⁰³

Penelitian yang dilakukan oleh Hanna Khafifah dkk menyatakan pendapatan mampu memoderasi hubungan ZIS terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa dengan adanya pengelolaan ZIS yang profesional dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.¹⁰⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Murbanto Sinaga, dkk menyatakan pendapatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan karena pendapatan yang tinggi meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga kebutuhan mendasar, baik makanan maupun non makanan dapat terpenuhi. Jika setiap orang memiliki pendapatan dan mampu memenuhi kebutuhan mendasar, maka tingkat kesejahteraan akan meningkat, sebaliknya jumlah penduduk miskin akan berkurang. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pendapatan per kapita memiliki peranan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan di Kepulauan Nias. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah progresif dalam meningkatkan produksi, sehingga pendapatan per kapita terus bertumbuh.¹⁰⁵

Penelitian yang dilakukan Made Tomy Widiarsana dan Luh Putu Aswitari yang menyatakan Pendapatan perkapita masyarakat di suatu daerah dapat dijadikan suatu

¹⁰² Lailatul Fajriyah Jayaningtyas dan Nugroho Suryo Bintoro, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin,” *Journal Of Development Economic And Social Studies* 2, no. 2 (2023): 350–60.

¹⁰³ Sari, “Analisis Tingkat Kemiskinan Masyarakat Di Provinsi Sumatera Utara.”

¹⁰⁴ Hanna Khafifah, Darwis Harahap, dan Zulaika Matondang, “ZIS dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan sebagai variabel moderating,” *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* 4, no. 2 (2023): 182–92.

¹⁰⁵ Sinaga dkk., “Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Per Kapita Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kepulauan Nias.”

parameter kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ketika pendapatan perkapita naik maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan mudah sehingga kemiskinan dapat berkurang.¹⁰⁶

Namun penelitian yang dilakukan oleh Raid Ghaniyu Putra menyatakan pendapatan perkapita tidak mampu memoderasi ZIS terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ketika seseorang memiliki tingkat penghasilan yang meningkat, maka kemampuan berzakatnya pun seharusnya akan meningkat. Namun, kendala yang terjadi pada saat ini yaitu kurangnya pendidikan yang diperoleh akan berzakat kepada masyarakat yang menjadikan masih kurangnya kesadaran masyarakat muslim akan berzakat yang akan berdampak pada pendapatan yang mereka peroleh sebesar apapun tidak menjamin dapat berpengaruh dalam bertumbuhnya ekonomi di Indonesia.¹⁰⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Azis Maulana dan Aan Julia yang menyatakan pendapatan perkapita berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar Pendapatan Perkapita yang diperoleh suatu kota, belum tentu dapat mengurangi Tingkat Kemiskinan pada kota tersebut. Hasil pengujian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Perkapita dengan Tingkat Kemiskinan. Hal ini terjadi karena Pendapatan Perkapita suatu daerah biasanya tidak diprioritaskan untuk penanggulangan kemiskinan, melainkan digunakan untuk perbaikan infrastruktur dari daerah yang bersangkutan.¹⁰⁸

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa dengan melibatkan masyarakat yang memiliki pendapatan lebih dalam pengelolaan dan distribusi zakat dapat membantu menangani masalah kemiskinan. sehingga dapat dirumuskan hipotesis:

¹⁰⁶ Made Tomy Widiarsana dan Aswitari Luh Putu, "Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pendapatan Perkapita, Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali," *E-Jurnal EP Unud* 11, no. 5 (2022): 1973–99.

¹⁰⁷ Raid Ganiyu Putra, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, Dan Zis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Dengan Pendapatan Perkapita Sebagai Variabel Moderating Tahun 2018-2022," *Uin Salatiga*, 2023.

¹⁰⁸ Maulana, Julia, dan Mafruhah, "Pengaruh Indeks Pendidikan, Gini Rasio, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Perkapita terhadap Tingkat Kemiskinan di Enam Provinsi Indonesia Tahun 2015-2019."

H₆: Pendapatan mampu memoderasi ZIS terhadap Kemiskinan.

